



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHARWAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 92142

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 315.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/126 m2 di KAB / KOTA
LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 262.975.000

1. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
13.100.000
2. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
223.875.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.300.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 218.809.436

F. HARTA LAINNYA Rp. 108.638.695

Sub Total Rp. 917.723.131

III. HUTANG Rp. 174.069.256

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 743.653.875

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.